**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

 Sistem dan kondisi masyarakat pada suatu negara memiliki kebutuhan yang sangat kompleks dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya juga keamanan. Hal ini menyebabkan negara tersebut berusaha menjalin hubungan atau interaksi dengan negara lain.

 Adanya kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan dari tiap-tiap negara tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya bantuan dari negara lain dan secara tidak langsung, ini merupakan hukum alam dimana kita tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan konteks kenegaraan, seluruh negara di dunia ini saling membutuhkan satu sama lain agar keberadaan negaranya dapat dipertahankan. Jelas terlihat bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri atau melepaskan negaranya di tengah kehidupan masyarakat internasional. Oleh karena itu negara tersebut melakukan hubungan atau kerja sama dengan negara lain. Namun dalam proses hubungan itu yang selalu mengedepankan pada kepentingan-kepentingan negara sendiri makan tidak jarang dalam hubungan antar negara sering ditemukan ada masalah dan konflik sendiri.

Dewasa ini kita berada dalam kegiatan ekonomi antar bangsa yang bergerak menuju satu yang saling ketergantungan ekonomi. Suatu ekonomi global jangan dianggap hanya sekedar perdagangan yang semakin besar diantara negara-negara dunia, karena yang tengah terjadi adalah suatu ekonomi dunia yang bergerak ke arah ekonomi tunggal, satu ekonomi dan satu pasar. Dengan demikian kita tidak dapat lagi mengatakan satu ekonomi nasional murni oleh negara. Bagian dunia yang lain terlalu besar untuk diabaikan, baik sebagai pasar maupun sebagai pesaing. Saat inilah kapitalisme global mulai berangsur melebarkan sayapnya melalui prinsip-prinsip ekonomi yang menciptakan masing negara pada ketidak mampuan negara memenuhi kebutuhannya dan ketidak mampuan negara mengolah sumber dayanya sendiri.

Kemenangan liberalisme sebagai tanda memasuki era *post cold war* seperti yang dideskripsikan dan diinterpretasikan Francis Fukuyamadalam bukunya *The End of History and the Last Man*telah mengubah karakteristik dan struktur sistem internasional yang menghasilkan kompleksitas baru dalam hubungan internasional.

Tatanan sistem yang makin kompleks dan masih dalam proses kristalisasinya terjadi berkat revolusi scientific dan teknologi yang telah menyatu dengan sistem kapitalisme dan menghasilkan kecenderungan-kecenderungan baru yang secara signifikan mengubah pola interaksi antar bangsa menuju pada bentuk tatanan yang belum pasti antara “globalisasi” dan partikularisme domestik “nasionalisme” (yang bisa jadi merupakan “*Reaction against Globalization”*).[[1]](#footnote-1)

Kecenderungan-kecenderungan baru tersebut antara lain; terjadinya polarisasi kekuatan telah mengubah struktur politik global menjadi semakin multi-polardan multi-sivisasional.[[2]](#footnote-2) Perubahan struktur kekuatan ini ditandai dengan munculnya aktor *non state* khususnya MNC yang semakin menguat perannya dalam politik internasional[[3]](#footnote-3) seperti yang dikemukakan kaum pluralis sehingga menciptakan dunia yang cenderung *multicentric* dimana terdapat banyak aktor dalam hubungan internasional termasuk aktor non-negara, dibanding *state centric.*

Disamping itu, isu-isu *low politics* dalam isu keamanan global kontemporer[[4]](#footnote-4) semakin meluas dan mengemuka sejalan dengan dibebaskannya pasar*.* Penguatan dimensi *low politics* merupakan implikasi dari kebangkitan kesadaran bahwa kerjasama adalah sebuah alternatif dalam mencegah dan menyelesaikan perang menurut kaum liberalis.

Kecenderungan lainnya yaitu munculnya regionalisme baru yang menurut Fawcett didorong oleh; berakhirnya perang dingin, perubahan dalam perekonomian dunia, berakhirnya paham tentang istilah dunia ketiga, serta demokratisasi.[[5]](#footnote-5) Perubahan tersebut telah membangkitkan kesadaran negara-negara di dunia akan pentingnya kerjasama di tataran strategis.

Kemenangan liberalisme merupakan momentum penting bagi arah konstelasi ekonomi politik internasional menuju sebuah pembebasan pasar yang mempengaruhi politik global di era ini. Seperti keyakinan kaum liberalis yang diutarakan Ricardodan Adam Smithserta John Stuart Millbahwa semangat perdagangan bebas merupakan alternatif dalam mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian universal[[6]](#footnote-6) dimana merupakan pupuk bagi kerjasama. Pandangan ini dikuatkan oleh pandangan RobertKeohanedanJoseph Nyedalam *Transnational Relation in World Politics* (1972)bahwa kerjasama adalah efek yang ditimbulkan oleh interdependensi ekonomi[[7]](#footnote-7) yang diciptakan oleh kegiatan perdagangan bebas yang dilakukan aktor negara maupun non-negara (perusahaan multinasional). Oleh karena itu pandangan realis tradisional Morgenthau yang membenarkan perang atas nama politik kekuasaan perlu dipertimbangkan relevansinya dalam konteks dunia yang semakin terintegrasi ini.[[8]](#footnote-8)

Arus ekspansi ekonomi pasar sebagai konsekuensi dibebaskannya pasar yang dipromosikan negara-negara industri dalam rezim ekonomi internasional hasil *Bretton Woods[[9]](#footnote-9)* telah mempercepat penyebaran paham neo-liberalisme yang membuka sistem ekonomi negara-negara berkembang dan akhirnya menciptakan gelombang industrialisasi dan modernisasi[[10]](#footnote-10), dimana justru berimplikasi pada kecenderungan keseimbangan ekonomi global[[11]](#footnote-11) seperti yang disampaikan ***Fareed Zakaria*** dalam bukunya *The Post American World[[12]](#footnote-12)* tentang *the raise of the rest* dimana menuntut adanya tata dunia baru yang lebih adil.

Dalam perkembangan ekonomi internasional, perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara dunia. Richard Rosercrance, seorang ahli perekonomian dunia memaparkan jika ingin makmur dalam suasana yang berubah seperti sekarang perdagangan harus memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga hubungan kerjasama antara negara maju dana negara berkembang.[[13]](#footnote-13)

Regionalisme ekonomi merupakan upaya yang mulai diagendakan utnuk membentuk masyarakat kawasan yang bekerja sama membentuk satu kesatuan ekonomi yang saling mengikat. Dr. Akrasanee mendefenisikan regionalisme ekonomi sebagai sebuah kecenderungan bagi sebuah kelompok dalam menentukan lokasi geografisnya untuk menentukan integrasi ekonominya.[[14]](#footnote-14) Pelaksanaannya dapat ditenggarai dari bentuk dan pertumbuhan kerjasama yang diinginkan dan dilakukakan diantara mereka. Pada hakekatnya pembentukan sebuah perkawanan ekonomi regional adalah pembentukan blok ekonomi.

Pasca kegagalan perundingan WTO, para pemuja pasar bebas beserta rezim pendukungnya mencari jalan lain untuk memecah kebuntuan akibat penolakan berbagai negara ke tiga yang tetap meminta perlindungan proteksi terhadap sektor-sektor sensitif mereka. Keadaan ini diperparah dengan krisis keuangan global yang melanda seluruh negara maju yang memaksa merubah haluan ekonomi ke arah regionalime dan bahkan proteksionisme melalui nasionalisasi dengan berpikir yang sama yaitu kapitaslime pasar. Para pengusung pasar bebas, negara maju, perusahaan raksasa dan lembaga keungan multinasional tidak mau kehilangan muka. *Free Trade Agreement*(FTA) digalakkan kembali dalam rangka memperluas pasar dan agenda-agenda neoliberal. Langkah ini diharapkan sebagai strategi untuk mengatasi kebuntuan perundingan WTO yang tidak membuahkan hasil dan sekaligus mencari lahan eksploitasi baru untuk mengatasi krisis keuangan yang tengah dihadapi.

Krisis keungan global lagi-lagi menjadi alasan logis untuk melancarkan system ekonomi politik yang dibangun diatas prinsip kapitalisme. Logika meraup keuntungan semaksimal mungkin pun harus dilakukan dengan makin banyak partner dagang. FTA terbaca jelas bahwa logika pasar bebas akan terus berusaha untuk mencari pasar untuk produk mereka yang bisa jadi *overload* di negara produsennya. Metode kerja samapun selalu dipilih para pemodal yang seringkali bersembunya di belakang aktor negara untuk menutupi semangat menjajah buruh di negara lain dan megeruk keuntungan semaksimal munkin dari negara lain.

Free Trade menjadi agenda penting disetiap kawasan-kawasan yang menyatakan dirinya pada kerjasama dan integrasi pada peningkatan pertumbuhan setiap masing anggotanya. Pemilihan pasar bebas dianggap sebagai salah satu jalan terbaik untuk meningkatkan laju ekonomi suatu negara yang merupakan sumber devisa negara serta invesatasi besara bagi pertumbuhan ekonomi untuk setiap negara. Perkiraan ini semakin dicanangkan karena melihat pertumbuhan-pertumbuhan negara-negara maju yang berada di WTO selalu berusaha menjadi superior akan regulasi perdagangan serta dominasi pada pasar yang akan selalu menguntungkan negara-negara tersebut.

Kerjasama International adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan antar bangsa - bangsa didunia dalam mengadakan hubungan timbal balik untuk dapat saling memenuhi kegiatannya. Pedoman yang dipakai oleh kelompok kerjasama adalah saling menguntungkan dengan tata cara yang sudah disepakati bersama. Kerjasama masing-masing negara semakin meluas dengan membawa pada kerangka lebih luas yang merujuk pada hubungan kerjasama antar kawasan. Kerjasama ini bergeser kearah kerjasama regional dengan masuknya Australia dan negara – negara anggota ASEAN lainnya dalam menghadapi perdagangan bebas yaitu dengan dibentuknya *ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement* atau disingkat dengan nama AANZFTA.

[[15]](#footnote-15)Perjanjian membentuk *ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement* mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, persetujuan pembentukan kawasan perdagangan *ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement* ditandatangani di Thailand pada bulan Februari 2009 oleh Australia, Selandia Baru dan 10 negara anggota ASEAN, AANZFTA ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 untuk Australia, New Zealand, Brunei Darussalam, Burma, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam. Sedangkan Thailand diberlakukan bahwa pada tanggal 12 Maret 2010 setelah menyelesaikan persyaratan internal. Sedangkan sisa negara anggota ASEAN yaitu Kamboja, Indonesia, dan Laos perjanjian ini akan mulai 60 hari setelah menyelesaikan prosedur ratifikasi yang diperlukan oleh masing – masing pihak, dimana tarif lebih dari 90% jenis produk yang diperdagangkan antara ASEAN, Australia, dan Selandia Baru akan dihilangkan setelah berlakunya perjanjian dalam tahap awal pelaksanaannya.

Perjanjian AANZFTA ini lahir dari masa yang panjang dari kepentingan-kepentingan negara maupun korporasi yang bermain di dalamnya. Kawasan menginginkan pertumbuhan ekonomi setiap anggotanya dengan menerapkan intgrasi pasar(*single market).* ASEAN sendiri yang pada perjanjian melalui tahapan yang panjang untuk sampai pada agenda perjanjian AANZFTA.

ASEAN merupakan suatu kawasan rezim Asia Tenggara yang mendasarakan penyelenggaraan organisasinya pada Delkarasi Bangkok 08 Agustus 1967 dengan lima negara pendirinya adalah Inonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand. Bertolak belakang dari pemikiran realis yang beranggapan ASEAN adalah semata-mata berangkat dari ide politik keamanan kawasan. Percepatan pembentukan integrasi kawasan ini tidak terlepas persuasi dari Amerika yang situasi pada perang dingin. Adanya ketakutan perluasan paham sosialisme di Asia Tenggara. Kawasan ini menjadi sudah barang tentunya menjadi perebutan bagi negara-negara besar yang menganut paham liberalis yang dibangun atas prinsip kapitalis. Isu keamanan menjadi perihal paling fundamental dalam kawasan ini. Secara lebih dalam semeetinya di analisa sudut kepentingan keamanan pasar kelompok dominan atas yang didominasi.[[16]](#footnote-16)

Seperti dipaparkan diatas ASEAN merupakan regionalisme yang bertumbuh pesat dengan perkembangan masing-masing negaranya. Hal inilah yang membuat integrasi kawasan lain memilik agenda besar untuk menggandeng ASEAN sebagai mitra perdagangan yang lebih pada mengarah pasara bebas.

Pasar bebas yang sudah lama dideklarasikan Australia-New Zealand yang tercantum dalam CER (Closer Economic Relations). CER merupakan pernjanjian perdagangan yang paling komprehensif bilateral gratis yang ada. Perjanjian perdagangan pertama antara Australia dan Selandia Baru tanggal kembali ke 1922, dan pada dasarnya Lain Itu masing-masing pihak akan perdagangan dengan lainnya. Ini Diikuti oleh Australia Selandia Baru Perjanjian Perdagangan pada tahun 1933, oleh Yang kedua negara saling memberi preferensi lain dan beberapa harga khusus tugas. Sebuah perjanjian perdagangan bebas parsial, Australia Selandia Baru Perjanjian Perdagangan Bebas (NAFTA), Mulai berlaku pada tahun 1966, yang menyebabkan penghapusan tarif dan pembatasan kuantitatif pada 80 persen dari perdagangan trans-Tasman dengan akhir 1970-an. Karena NAFTA tidak terstruktur untuk mengatasi lingkungan ekonomi internasional berubah dan karena itu tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk menghilangkan pembatasan tersisa, Australia dan Selandia Baru sepakat untuk mengembangkan melalui lebih terbuka sistem perdagangan bilateral.[[17]](#footnote-17)

 Pada dasarnya tujuan ANZCERTA adalah sama dengan regional ASEAN untuk:

1. Memperkuat hubungan yang lebih luas antara Australia dan Selandia Baru
2. mengembangkan hubungan ekonomi lebih erat antara negara anggota melalui ekspansi yang saling menguntungkan dari perdagangan bebas antara Selandia Baru dan Australia
3. menghilangkan hambatan perdagangan antara Australia dan Selandia Baru dengan cara bertahap dan progresif di bawah jadwal yang disepakati dan dengan minimal gangguan
4. mengembangkan perdagangan antara Selandia Baru dan Australia dalam kondisi persaingan yang adil.[[18]](#footnote-18)

ANZCERTA telah mendukung pertumbuhan yang kuat dalam perdagangan di seluruh Tasman dengan pertumbuhan rata-rata tahunan dalam perdagangan dua arah barang dari 6,7 persen, dari tahun 1983 ke 2014. Selandia Baru saat ini mitra dagang terbesar keenam di Australia, kesembilan sumber terbesar investasi asing dan tujuan yang paling penting yang ketiga untuk investasi Australia di luar negeri. Selama 32 tahun CER, komposisi perdagangan antara Australia dan Selandia Baru telah berubah secara dramatis, yang mencerminkan perubahan dalam teknologi, daya saing, struktur industri dalam negeri, Liberalisasi perdagangan dan permintaan konsumen.[[19]](#footnote-19)Dengan sebagian besar tujuan perdagangan disepakati, Pemerintah Australia dan Selandia Baru memutuskan untuk mengambil *Single Economic Market(SEM)* pendekatan untuk hubungan ekonomi lebih dekat. SEM dimaksudkan untuk menyelaraskan dua ekonomi untuk memungkinkan bisnis, konsumen dan investor untuk melakukan operasi di seluruh Tasman dalam lingkungan peraturan mulus.

Hubungan ekonomi antara AFTA dan ANZCERTA merupakan mempunya tujuan yang sama dalam meningkatkan pertumbuhan masing-masing negara kawasannya. Beberapa negara diantaranya pasti secara langsung berusaha memanfaatkan pasar bebas ini untuk meningkatkan pendapatan atau stabilitas perdagangan satu negara ke negara lainnya. Terumatama negara-negara kawasan ASEAN-Australia-New Zealand, Indonesia sebagai negara besar tentu saja memafaatkan peluang ini dengan meningkatkan hubungan bilateral dengan negara lain salah satunya adalah New Zealand.

Hubungan bilteral Indonesia-New Zealand sebenarnya sudah berlangsung lama, sejak dibukanya hubungan diplomatik antara kedua negara pada tanggal 28 Juni 1958, Wellington menjadi tempat untuk mewakili kepentingan Indonesia di Selandia Baru dan Pasifik. Sejak berdirinya hubungan diplomatik, seperti normal dalam hubungan antar bangsa, telah ada pasang surut. Perbedaan kondisi geografis, sosial, ekonomi, sejarah dan bahkan ideologi misalnya, telah menciptakan berbagai tantangan tapi pada kesempatan saat yang sama dalam mengembangkan hubungan kedua bangsa[[20]](#footnote-20)

Pada 27 Februari 2009 Selandia Baru, yang diwakili oleh Menteri Perdagangan Tim Groser (yang juga mantan Duta Besar Selandia Baru di Jakarta) menandatangani ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Penandatanganan berlangsung di KTT ASEAN ke-14 di Hua Hin, Thailand, di mana kepala negara dari negara-negara ASEAN yang hadir. Dengan menandatangani perjanjian Selandia Baru berkomitmen untuk perdagangan bebas dengan 10 negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam[[21]](#footnote-21)

Untuk Selandia Baru, perjanjian perdagangan bebas memberikan kesempatan untuk meningkatkan volume ekspornya, terutama dalam produk khusus yang seperti pertanian, daging dan produk susu. Sementara Indonesia memperoleh kesempatan untuk menembus pasar non-tradisional yang sampai sekarang belum sepenuhnya dimanfaatkan, terutama untuk produk-produk non migas seperti selesai pakaian, furnitur dan pakaian. Di bawah payung perdagangan bebas 99 persen dari tarif pada produk Selandia Baru akan semakin berkurang selama 12 tahun di Indonesia[[22]](#footnote-22)

Indonesia harus berbuat lebih banyak untuk mendorong hubungan bilateral antara Indonesia dan Selandia Baru. Dengan giat mempromosikan perdagangan bilateral, pariwisata dan investasi. Hubungan bilateral Indonesia-New Zealand kiranya mampu mengejar upaya bersama dan inisiatif dalam menangani isu-isu regional dan global kepentingan bersama. Perkembangan positif telah terjadi dalam hubungan perdagangan yang tumbuh dengan cepat kami. Indonesia sekarang mitra Selandia Baru terbesar perdagangan dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan pasar ekspor terbesar ketujuh kami di seluruh dunia.

Kedua negara terlibat dalam negosiasi untuk mencapai ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement; perjanjian perdagangan bebas yang paling komprehensif (FTA) yang pernah masuk ke dalam ASEAN. Diyakini bahwa pengaturan ini akan membawa hubungan yang lebih signifikan antara sektor perdagangan dua negara. Indonesia juga merupakan teman penting dari Selandia Baru dalam pengelompokan regional. Sebagai anggota terkemuka ASEAN, dan peserta kunci dalam KTT Asia Timur, ASEAN Regional Forum, dan APEC, Indonesia terus memainkan peran penting dalam negara berkembang arsitektur regional.

1. **Indentifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian yang terdapat dalam permasalah maka peneliti mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana kebijakan Indonesia terhadap pasar bebas AANZFTA ?
2. Bagaimana perkembangan hubungan perdagangan Indonesia – Selandia Baru setelah AANZFTA?
3. Bagaimana peluang perdagangan Indonesia – New Zealand dan kendala yang dihadapai dalam AANZFTA?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang dikemukakan, maka penulis membatasi masalah ini dengan menitikberatkan pada hubungan perdangangan Indonesia-New Zealand yang dipengaruhi dengan adanya pasar bebas antar kawasan ASEAN-AUTRALIA- NEW ZEALAND melalui analisis ekonomi politik internasional implementasinya dalam perdangangan internasional antara Indonesia dengan New Zealand.

1. **Perumusan Masalah**

Agar mempermudah (facilitate) dalam menganalisa permasalahan berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka dirumuskan suatu masalah yang diteliti yaitu sebagai berikut:

**“Sejauh Mana AANZFTA(Asean-Autralia-New Zealand Free Trade Argreement) Mempengaruhi Perdagangan Indonesia-New Zealand”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam upaya memperoleh informasi yang ada relevansinya dengan pokok-permasalahan yang peneliti bahas( mengacu pada identifikasi masalah).

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana kebijakan Indonesia terhadap pasar bebas AANZFTA ini.
2. Mengetahui bagaimana perkembangan hubungan perdagangan Indonesia dengan Selandia Baru.
3. Mengetahui seberapa besar peluang perdagangan Indoensia-New Zealand dan kendala yang dihadapi dalam ANZFTA(Asean-Australia-New Zealand Free Trade Argreement).
4. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan selain dapat berguna bagi peneliti dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan, jelasnya sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan bagi pengembangan studi Hubungan Internasional. Khususnya peminat masalah-masalah HI dalam bidang Ekonomi Politik Internasional khususnya soal dinamika pasar bebas AANZFTA.
2. Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional diharapkan penelitian ini berguna dalam melatih cara berpikir secara sistematis untuk mengamati dan mendapatkan kejelasan mengenai permasalahan yang menjadi objek peneliti.
3. Dengan penelitian ini daharapakn mampu meningkatkan pemahaman dengan memperdalam pengetahuan sehubungan dengan Pengaruh AANZFTA(Asean-Australia-New Zealand Free Trade Argreement terhadap perdagangan Indonesia-New Zealand.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kemampuan dalam berpikir dan sebagai media untuk meningkatkan kemampuan penalaran, pengetahuan, dan teori yang diperoleh selama belajar di Perguruan Tinggi.
5. Sebagai masukan dan bahan komparatif bagi penelitian sejenis serta menjadi sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
6. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian kesarjanaan Strata Satu (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.
7. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
8. **KERANGKA TEORITIS**

 Dalam meningkatkan pemahaman akan masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, penulis mengemukakan kerangaka pemikiran terlebih dahulu beserta pendekatan yang berfungsi untuk menjelaskan atau memahami fenomena yang dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun pendekatan Hubungan Internasional yang digunakan adalak konsep hubungan perdagangan internasional dan pasar bebas.

 Hubungan antar negara terjadi karena adanya upaya suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi menjaga tingkat kesejahteraan masyrakat dan untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Namun tidak semua kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi sehingga kemudian suatu negara melakukan kerja sama ekonomi dengan negara lain. Kerja sama ekonomi jauh lebih dari sebatas antar negara jauh lebih meliputi antar kawasan yang menciptakan suatu pasar tunggal. Hal ini dapat berbentuk perdagangan internasional yaitu ekspor-impor,investasi dan jasa. Hubungan timbal balik ini kemudian bisa saja berlaku dalam setiap lini hubungan internasional.

 Hubungan Internasional merupakan suatu ilmu yang bersifat interdipliner, artinya Hubungan Internasional memiliki hubungan dengan ilmu lainnya dalam usaha mengkaji suatu masalah yang timbul , walaupun perhatian utamanya tetap pada hubungan antar negara dan antar pemerintah. Menurut J.C. Johari:

 **“Hubungan Internasional merupakan sebuah study tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga study tentang pelaku-pelaku non negara(Non actors states) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas negara”[[23]](#footnote-23)**

Ilmu Hubungan Internasional juga merupakan bagian dari ilmu hubungan sosial yang mencakup bagian dari aspek kehidupan manusia dari masyarakat internasional. Seperti yang dikemukakan K.J Holsty dalam bukunya Politik Internasional: suatu kerangka analisis tentang konsep Hubungan Internasional:

**“ Hubungan Internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi dianatara masyrakat negara-negara, baik yang dilakukan pemerintah maupun warga negaranya. Pengkajian hubungan internasional yang meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, komunikasi serta pengembangan nilai-nilai dan etika internasional”[[24]](#footnote-24)**

Dalam Hubungan Internasional terdapat adanya sebuah kerja sama Internasional, sedangkan pengertian kerja sama Internasional itu sendiri menurut Koesnadi Kartasamita dalam bukunya Organisasi Internasional dan Administrasi Internasional:

 **“ Kerja sama dalam masyarakat internasional merupakan sebuah keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdepedensia dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional. Kerjasama internasional tejasi karena nasional understanding dimana mempunyai; corak dan tujuan yang sama keinginan yang didukung utnuk kondisi internasional yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama dianatara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik”[[25]](#footnote-25)**

Pada masa sekarang ini sebagai bentuk dari perdagangan internasional dalam wujud organisasi internasional telah banyak dilakukan untuk berbagai macam kepentingan dalam berbagai bentuk aspek kehidupan. Organisasi Ineternasional merupakan suatu proses yang sangat dinamis terhadap perkembangan hubungan antar negara ata bangsa. Secara umum organisasi internasional itu adalah organisasi yang ada pada masyrakat internasional.

 I Wayan Parthiana dalam bukun Organisasi Internasional mendefenisika sebagai berikut:

 **“Organisasi internasional adalah suatu oraganisasi atau perkumpulan yang didirikan oleh anggota-anggota yang terdiri dari negara-negara atau badan-badan non pemerintahan yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk mencapai suatu tujuan.”**

Oraganisasi internasional sebenarnya didirikan bukan hanya sekedar untuk mencapai tujuan masing-masing pihak saja, tetapi juga bekerjasama untuk kepentingan bersama, sehingga negara-negara yang membentuk oraganisasi internasional merasakan bahwa tujuan mereka dapat tercapai.

Adapun defenisi oraganisasi internasional menurut Jack Plano dan Roy Olton dalam buku Hubungan Internasional adalah sebagai berikut.

**“Organisasi internasionalmerupakan sebuah struktur atau lembaga resmi yang melintasi batas negara yang berfungsi sebagai salah satu mekanisme yang menunjang kerja sama antara negara-negara dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial datau bidang-bidang lainnya yang berhubungan”[[26]](#footnote-26)**

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Hubungan Internasional menyangkut aspek-aspek kehidupan sosial manusia dimana salah satu adalah aspek ekonomi yang kemudian mengahsilkan suatu hubungan ekonomi.

Menurut Dominic Salvatore dalam bukunya Ekonomi Internasional adalah :

**“Ekonomi internasional adalah suatu aktifitas yang ditimbulkan oleh ekonomi dari keadaan saling ketergantungan unit-unit yang melintasi batas-batas negara dan bersifat internasional.”**

Sedangkan menurut Norpirin Ph D dalam bukunya Ekonomi Internasional menjelaskan bahwa:

**“Ekonomi Internasional mencakup aspek mikro maupun aspek makro,yang menyangkut masalah jual-beli secara internasional(yang sering disebut ekspor-impor)”[[27]](#footnote-27)**

Kecenderungan suatu negara untuk melakukan tindakan terjadinya hubungan dengan negara-negara lain, guna memenuhi kebutuhannya hingga tercapainya suatu kemakmuran bangsa. Menurut R.E.A Manoer:

**“ Tujuan ekonomi internasional adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksanaan ekonomi internasional adalah kerja sama bantu-membantu antar bangsa dan antar negara. Dengan adanya kerjasama ini maka kebutuhan yang tidak dipenuhi dalam negeri dapat dipenuhi oleh negara lain”[[28]](#footnote-28)**

Dengan demikian pada dasarnya dalam ekonomi internasional, terjadi kerjasama untuk menjalankan perekonomian dunia, contohnya; perdagangan,dengan perdagangan merupakan pusat evaluasi dalam interaksi antar negara. Merupakan hal yang tidak mungkin suatu negara berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain dalam era global ini untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Oleh karena itu, suatu kerjasama diantara negara-negara yang mempunyai kepentingan tersebut dalam perdagangan internasional. Robbock menjelaskan perdagangan internasional sebagai berikut:

**“Perdagangan Internasional terdiri dari kegiatan perniagaan dari suatu negara asal yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional coorperation untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal, tenaga kerja, teknologi dan merk dagang”[[29]](#footnote-29)**

Guna mencapai tujuan ekonomi yaitu tingkat kemakmuran atau kekayaan maka politik internasional menjadi mekanisme didalam mencapai kepentingan ekonomi suatu negara. Sehingga, terbentuk interaksi antara ekonomi dan politik dengan tujuan pengejaran kekuasaan dan kekayaan.

***Robert Gilpin*** menyatakan ekonomi politik internasional sebagai:

**“Ekonomi-politik internasional, oleh karena itu merupakan “interaksi timbal-balik dan dinamis antara upaya pengejaran kekayaan dan kekuasaan dalam hubungan internasional”.** [[30]](#footnote-30)

Secara sederhana dapat dikatakan ekonomi politik internasional adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara ekonomi dan politik.

Adapun definisi ekonomi politik internasional menurut ***Mohtar Mas’oed*** adalah sebagai berikut:

**“Ekonomi Politik Internasional sebagai studi tentang saling-kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara “negara” dengan “pasar”, antara lingkungan domestik dengan yang internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat.”[[31]](#footnote-31)**

***T. May Rudy*** juga memberi definisi yang sama pada ekonomi politik internasional yaitu:

**“...sebuah kajian aplikatif-empiris yang mempelajari keterhubungan serta interaksi yang berlangsung atau saling mempengaruhi (dan juga saling mempertimbangkan) antara faktor mekanisme pasar (sebagai komponen ekonomi) dengan faktor kebijakan pemerintah (sebagai komponen politik) serta dengan perubahan sosial (sebagai komponen sosiologi).”[[32]](#footnote-32)**

Fenomena hubungan internasional ditandai dengan suatu prioritas baru dalam bentuk integrasi regional yang dijadikan sebagai dasar pada sebuah paradigma, dimana kepentingan kelompok menjadi yang utama atau dengan perkataan lain, paradigma kepentingan regional yang ada. Maka, pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional masing-masing negara. Paradigma atas kepentingan regional diformulasikan ke dalam kerjasama regional di beberapa kawasan/wilayah dunia saat ini yang akan mengarah kepada sifat pengelompokan diri ke dalam konstelasi kepentingan ekonomi regional/global.

Konstelasi kepentingan ekonomi ini tampaknya semakin mempertegas paradigma integrasi regional dalam aspek ekonomi-politik global. Terutama munculnya kekuatan ekonomi regionalisme, seperti NAFTA (*North American Free Trade Agreement*/Perdagangan Bebas Amerika Utara), EC (*European Union*/Uni Eropa), ASEAN(Assosiation of South East Asian Nations), APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*/Kerjasama Ekonomi Asia PAsifik), CER (*Australia\_New Zeland Closer Economic Relations Trade Agreement*/Perjanjian Perdagangan dan hubungan ekonomi Australia dan Selandia Baru) semakin diperhitungkan dalam agenda dan aktivitas sebuah negara. Kecenderungan ini mencerminkan semakin kuatnya “*Economic Links”*antara negara yang pada kenyaataannya dibangun atas dasar kedekatan Geografis.

Sebagaimana dikatakan oleh Bahgawati “Negara-negara yang memiliki kedakatan geografis antara satu dengan lainnya memiliki proporsi perdagangan yang tinggi ketimbang negara-negara yang letaknya berjahuan”[[33]](#footnote-33)

Ide integrasi ekonomi berawal dari kerjasama antara beberapa negaradalam masalah harga, tariff perizinan perdagangan dan lainnya. Guna meningkatkan kekuatan preferensi dan komitmennya, secara teoritis integrasi ekonomi tersebut didasarkan pada.[[34]](#footnote-34)

1. Kawasan perdagangan preferensial ( Preference trading Area/FTA, yaitu beberapa negara setuju menurunkan pajak atau preferensi dan tariff perdagangannya. Konsep ini mengacu pada kerangka WTO yang dewasa ini telah disepakati oleh semua negara anggota. Contoh preferensial adalah Generalised System of Preferences (GSP)

2. Kawasan perdagngan bebas free trade area (FTA) yaitu beberapa negara anggota (yang bergabung) berupaya menghilangkan hambatan tariff dan non tariff dalam perdagangannya, namun masing-masing negara tetap mempertahankan tariff mereka dengan negara bukan anggota.

3. Uni bersatu (Custom Union) serupa dengan kawasan perdagangan bebas, namun negara-negara anggota harus melakukan tariff eksternal pabean yang seragam (Common External Tariff, CETs) bagi impor negara-negara bukan anggota, misalnya UNI Eropa.

4. Pasar bersama/bersatu (Common Market), adalah uni bersatu dengan bebasnya mobilisasi capital, tenaga kerja, dan perusahan untuk keluar masuk negara anggota tanpa hambatan, misalnya pasar bersama Eropa.

5. Uni sempurna (Complete Union) adalah pasar bersatu yang dilengkapi dengan kebijakan moneter dan fiscal yang seragam. Uni ini merupakan tujuan akhir Uni Eropa dan blok ekonomi regional lainnya dan

6. Uni Politik (Political Union), yaitu beberapa negara anggota dibawah satu managemen tunggal. Disini berlaku sentralisasi control terhadap bukan hanya moneter dan fiscal melainkan juga parlemen, keamanan, pajak dan sebagainya.

 Krisis ekonomi yang menimpa negara-negara di Asia pada 1997-1998adalah bukti nyata tentang bagaimana rapuhnya ekonomi nasional mengahadapi dinamika perubahan konstelasi ekonomi politik global. Selain krisis keuangan, negara-negara Asia yang pada umumnya merupakan negara berkembang, juga ingin terlepas dari ketergantungannya terhadap dunia barat. Mekanisme kerjasama multilateral dengan lembaga seperti IMF dan World Bank ternyata tidak efektif untuk menyelesaikan krisis, justru menjerat mereka dalam utang.

Oleh karena itu diperlukan mekanisme kerjasama baru yang memberi efek interdependensi yang lebih resiprokal atau yang saling menguntungkan,sehingga paradigma yang menjadi substansial dalam merespon tantangan diatas yaitu melalui regionalisme dengan mekanisme FTA. Regionalisme adalah salah satu fenomena ekonomi-politik pasca perang dingin yang mengalami perkembangan pesat pada dekade 1990an. Regionalisme yang muncul tahun 1990an merupakan sebuah respon atas perubahan global yang terjadi dan dipandang sebagai instrumen efektif untuk mencapai tujuan bersama. Dari perspektif neo-fungsionalisme, regionalisme memerlukan sebuah wadah institusional untuk berkembang. Hal ini menunjukkan dua hal, pertama regionalisme didefinisikan sebagai sebuah preskripsi dan kedua peran negara signifikan dalam menentukan kinerja institusi.

Penguatan regionalisme ekonomi menjadi faktor pendorong yang kuat terutama di Uni Eropa yang menjadi model organisasi regional. Kecenderungan intitusionalisasi regional ini pun diikuti oleh kawasan lain termasuk Asia Tenggara. Regionalisme dipandang sebagai konsep yang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi domestik yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh suatu negara serta instrumen bagi peningkatan kesejahteraan, dan sarana efektif dalam mengatasi konflik dalam kawasan yang tentunya berpengaruh pada kestabilan ekonomi.

Tahapan akhir dari regionalisme yaitu integrasi. Dengan integrasi diharapkan setiap negara dapat mencapai kepentingan nasional ekonominya serta mampu menghadapi fenomena krisis ekonomi global serta mampu mengurangi tingkat ketergantungan. Dalam konteks perdamaian, sebagai upaya jangka panjang untuk mengurangi konflik dan jangka pendek dengan mekanisme resolusi konflik.

***Ernest Haas*** seorang tokoh dari aliran neo-fungsionalis menyatakan pendapatnya tentang integrasi:

**“Proses dengan mana aktor-aktor politik di beberapa wilayah nasional yang berbeda terdorong untuk memindahkan kesetiaan, harapan, dan kegiatan politik mereka ke suatu pusat baru yang lembaga-lembaganya memiliki atau menuntut jurisdiksi atas negara-negara nasional yang ada sebelumnya.”[[35]](#footnote-35)**

Perlindungan terhadap keamanan nasional yaitu kepentingan ekonomi ini berimplikasi pada timbulnya persaingan yang bisa berujung pada konflik. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan institusional dalam kerangka kerjasama agar tercipta persaingan yang sehat dan tidak eksploitatif. Ini merupakan harapan daripada pendekatan kaum neo-fungsionalis sendiri yaitu kerjasama regional yang lebih mendalam dan pengokohan dan penguatan lembaga institusi.[[36]](#footnote-36)

Regionalisme dianggap penting karena region merupakan wadah paling tepat dan paling mungkin untuk menerima perubahan dan mengintensifkan resistensi dari tekanan kompetisi kapitalisme global. Menurut perspektif realis, ketidaksetaraan kekuatan (unequal power) dapat menciptakan logika yang tidak mendukung pasar kapitalis, oleh karena itu regionalisme digunakan untuk menciptakan kesetaraan kekuasaan. Sedangkan perspektif kontra-realisme menyatakan bahwa regionalisme merupakan sarana untuk memahami kondisi sosial-ekonomi yang berubah yang akan mengubah karakter, lingkup, dan arena kompetisi kekuasaan

Menurut Tinbergen, **Integrasi ekonomi** merupakan penciptaan struktur perekonomian internasional yang lebih bebas dengan jalan menghapuskan semua pembatasan-pembatasan (*barriers*) yang dibuat terhadap bekerjanya perdagangan bebas dan dengan jalan mengintroduksi semua bentuk-bentuk kerjasama dan unifikasi. Integrasi dapat dipakai sebagai alat untuk mengakses pasar yang lebih besar, menstimulasi pertumbuhan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nasional.[[37]](#footnote-37)

Integrasi pasar bebas AANZFTA merupakan implementasi penguat dari ketergantungan dari masing-masing negara dalam regionalnya masing sehingga ada keinginan untuk meningkatkan perluasan pasar bebas ke kawasan lain, dalam tujuan dasarnya adalah pasar bebas.

Menurut Adam Smith, **Pasar bebas** sebagai suatu wadah untuk menampung yang dihasilkan oleh setiap individu yang berpangkal pada paham kebebasan yang diberikan kepada pelaku – pelaku ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada campur tangan pemerintah.[[38]](#footnote-38)

Perjanjian single market di dalam AANZFTA menjadi sangat berpengaruh terhadap stabilitas negara-negara anggotanya, dimana masing-masing negara memainkan peran sebagai aktor untuk memperoleh kepentingan nasionalnya(*national interesst)*nya. Menurut **Morgenthau:**

**”Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”.[[39]](#footnote-39)**

Proses pemanfaatan pasar bebas dianggap sebagai hal meningkatkan pertumbuhan negara melalui perdangangan dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. Setiap negara akan membuka jendela terhadap negara lain, dalam kerangka AANZFTA. Sehingga setiap negara akan berusaha menjalin hubungan bilateral terhadap negara lain. Salah satu yang dibahas dalam penelitian ini adalah hubungan biltaeral perdagangan Indonesi-New Zealand.

David Taylor, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia mengatakan, **“There is no better time than now to get engaged with Indonesia, to do new things and to explore opportunities.”[[40]](#footnote-40)** Demikian menggambarkan peluang dan kesempatan ke depan hubungan Indonesia-Selandia Baru. Hubungan perdagangan Indonesia-Selandia Baru kian membaik melihat masing-masing negara berusaha menjalin kerja sama. Setidaknya ada empat prioritas bidang kerjasama bilateral dan urgen, yaitu geotermal, pertanian-food security.

Hubungan kerja sama kian erat dan kuat, tidak saja karena besarnya peluang dan potensi yang ada, tetapi juga meningkatnya perhatian pemerintah dan non pemerintah kedua negara untuk berperan lebih aktif dan menyeluruh. Pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Selandia Baru John Key di Myanmar di selasela ASEAN Summit pertengahan bulan lalu, yang membahas isu-isu penting kedua negara, merupakan indikasi kuat hubungan Indonesia-[Selandia Baru](http://www.comparinggenie.com/code/r.php?r=yahoo%7CSelandia%2520Baru&t=1&did=1&uid=0&type=bl&subid=1060_22373&rkw=Selandia+Baru&rurl=http%3A%2F%2Fnasional.sindonews.com%2Fread%2F937802%2F18%2Fbabak-baru-indonesia-selandia-baru-1418695695&domain=sindonews.com&lnktype=10&v=0.093&browser=Chrome_46&country=ID) semakin penting ke depan.

Perkuatan hubungan kerja sama antara Indonesia-Selandia Baru semakin mengalami peningkatan berangkat dari pernyataan Perdana Menteri Selandia Baru **John Key,**

**“Hubungan Perdagangan Indonesia dan Selandia Baru dapat dijadikan benchmarket hubungan ekonomi antar negara-negara Asean terutama setelah diratifikasinya Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area(AANZFTA) serta peningkatan perdagangan diantara dua belah pihak”[[41]](#footnote-41)**

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis mencoba membuat konkulsi diatas untuk mendukung dan mengarahkan Hipotesi, penulis mencoba untuk menguraikan dan mengemukakan beberapa asumsi antara lain :

1. Ditengah arus globalisasi sekarang suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling membutuhkan kerjasama internasional yang merupakan suatu interaksi yang dilakukan setiap masing negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya. Pasar bebas AANZFTA merupakan salah satu bentuk interaksi perdagangan yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan perdagangan dalam masing negara tersebut yang memerhatikan kebutuhan negaranya sendiri.
2. Dengan adanya pasar bebas AANZFTA maka peluang perdangangan Indonesia – Selandia Baru akan mengalami peningkatan seturut melihat kebutuhan dan hubungan bilateral kedua negara terus mengalami perkembangan.
3. Peningkatan perdagangan akan terus dipengaruhi oleh kondisi hubungan yang baik antar kedua negara, maka dibutuhkannya kerja sama yang konsisten dalam meningkatkan taraf perdagangan serta melihat peluang pasar diantara kedua negara.
4. **Hipotesis**

Berdasarkan teori-teori dan berbagai asumsi dalam kerangka teoritis di atas maka berikut ini penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai dugaan atau asumsi serta merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang dirumuskan:

**” Jika Implementasi AANZFTA dalam kerangka pasar bebas mampu memajukan ekonomi suatu negara melalui perluasan dan penurunan tarif perdagangan regional AANZFTA. Maka peluang Perdaganagan Indonesia New Zealand akan mengalami peningkatan .”**

1. **Operasinal Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel****(Teoritik)** | Indikator(Empirik) | Verifikasi(Analisis) |
| Variabel Bebas:Pengaruh AANZFTA(Asean-Australia-New Zealand Free Trait Agreement) yang terbentuk dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara melalui pasar bebas. | 1. Adanya kesepakatan penghapusan dan pengurangan tarif dalam perdagangan kawasan AANZFTA.
 | 1. Data(fakta dan an gka)AANZFTA berupaya meningkatkan ekonomi kawasan Asean-Australia-New Zealand melalui pengurangan dan penghapusan tarif.

(<http://dfat.gov.au/trade/agreements/aanzfta/pages/background-to-the-asean-australia-new-zealand-free-trade-area.aspx>) |
| 1. Adanya kerja sama antara negara-negara kawasan dalam memperkuat hubungan perdaganga antar negara-negara.
 | 1. Adanya dimasing-masing kawasan kerjasama yang sudah dibangun sejak lama. Sehingga negara dikawasan ini berkehendak baik untuk lebih meningkatkan lagi dalam pasar bebas AANZFTA.

(<http://aanzfta.asean.org/index.php?page=about-aanzfta>) |
| Variabel Terikat:Maka Perdagangan Indonesia-Selandia Baru akan mengalami peningkatan. | 1.Kerja sama perdagangan Indoensia Selandia Baru mengalami perkembangan di sektor ekspor mengalami pertumbuhan. . | 1. Data (fakta dan angka) Adanya peningkatan ekspor –Impor dimasing negara.

(<http://financeroll.co.id/news/hubungan-ekonomi-indonesia-selandia-baru-bisa-menjadi-benchmark/>) |
|  | 1. Forum kerja sama dalam bisnis dan perdagangan Indonesia –Selandia Baru terus ditingkatkan ditandai dengan pertemuan-pertemuan para pengusaha Indonesia-Selandia Baru.
 | 1. Adanya (fakta dan angka) mengenai dampak forum dalam arus perdagangan Indonesia-Selandia Baru.(<http://www.kemendag.go.id/id/photo/2012/11/24/seminar-peningkatan-kerjasama-perdagangan-dan-investasi-indonesia-selandia-baru>)
 |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**INDONESIA**

**NEW ZEALAND**

**AANZFTA**

**(ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AGREEMENT)**

**BILATERAL**

**KEPENTINGAN NASIONAL**

**KEPENTINGAN EKONOMI**

**PERTUMBUHAN PERDAGANGAN**

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Untuk mengarahkan penelitian ini perlu adanya anggapan dasar dan kerangka konseptual yang merupakan pijakan dasar penentuan dan penulisan hipotesa. Untuk keperluan penelitian penulis mencoba mengemukakan serangkaian teori dan premis mayor dan premis minor sebagai acuan ilmiah dalam menggenelarisir pokok permasalahan dan mempunyai hubungan.

Dalam penulisan skripsi ini, unit variabel dependen (variabel yang dipengaruhi) yaitu: “Pengaruh AANZFTA(Asean-Australia-New Zealand Free Trade Agreement) dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara melalui pasar bebas.” akandijadikan sebagai unit analisis yang dikategorikan dalam tingkat analisa kawasan. Sedangkan, variabel independen yang dijadikan sebagai unit explanasi yaitu: “Terhadap Stabilitas Perdagangan Indonesia-New Zealand dapat meningkat lagi melalui pasar bebas AANZFTA” akan digunakan penulis sebagai unit penjelas pada tingkat negara-bangsa.

Sehingga, dalam merangkai jenis hubungan tingkat analisis di dalam penulisan skripsi ini, digunakan tingkat analisis korelasionis yakni unit analisis kawasan dalam variabel terikat yang dipengarui secara koheren oleh unit explanasi negara-bangsa dalam variabel bebas.

1. **Methode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga bentuk metode penelitian:

1. Metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil-hasil pengamatan dari beberapa kejadian dan masalah yang tersedia di tengah-tengah realita yang ada. Data diorganisasikan secara sistematis untuk melukiskan fakta atau bidang tertentu secara faktual dan cermat, dalam pelaksanaannya metode ini tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data saja tetapi meliputi analisa dan interpretasi data.
2. Metode historis analisis yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis fenomena-fenomena atau kejadian di masa lampau secara generalis di dalam memahami situasi sekarang dan kemungkinan dapat berkembang di masa yang akan datang berdasarkan sumber data sekunder.
3. Meotde Korelasi Analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan mencari, mengkaji serta menganalisa ada tidaknya hubungan atau derajat hubungan antara dua atau lebih gejala.
4. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data dari :

1. Studi kepustakaan (*Library Research*) yakni meneliti dan mengumpulkan data serta informasi dari berbagai bahan bacaan baik dari buku maupun dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Baik yang terdapat di perpustakaan maupun yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, badan-badan resmi maupun lembaga-lembaga lainnya maupun lewat media internet.
2. **Lokasi Dan Lamanya Penelitian**

**1. Lokasi Penelitian**

1. **Central For Strategic International Studies (CSIS)**

 Jl. Tanah Abang III No. 23-27, Jakarta Pusat.

1. **Kedutaan Selandia Baru(New Zealand)**

P.O BOX 2439

BRI II Building,23rd Floor. Jl.Jend. Sudirman.Kav.44-46,Jakarta 10210

1. **Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat.**

Jl. Kawuluyaan Indah II No. 4 Bandung

1. **Perpustakaan FISIP Unpas**

 Jl. Lengkong Besar 68 Bandung

1. **Perpustakaan UNPAR**

Jl. Ciembiulewit.

1. **Lama Penelitian**

**Tabel Kegiatan Penelitian 2015-2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  Bulan & MingguKegiatan | November | Desember | Januari | Februari | Maret | April |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Tahap Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Konsultasi Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pengajuan Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pengumpulan Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Analisis Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kegiatan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Peny. Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Seminar Draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sidang Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Sistematika Penulisan.**

Untuk mempermudah di dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis menguraikannya dalam bentuk bab-bab yang terdiri dari:

* **BAB I** Bagian ini merupakan bagian pembuka suatu permasalahan yang diharapkan dapat menghantarkan pembaca untuk dapat memahami permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Di dalamnya meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode dan teknik pengumpulan data, lokasi dan lamanya penelitian, dan sistematika penulisan.
* **BAB II** Bagian ini akan membahas uraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan variabel bebas yaitu konsep yang menjelaskan dan meramalkan masalah tersebut. Bab ini akan terdiri dari uraian ataupun informasi mengenai Pengaruh AANZFTA(Asean-Australia-New Zealand Free Trade Agreement) dan Juga membahas serta memaparkan AANZFTA itu sendiri.
* **BAB III** Bagian ini berisikan uraian atau informasi mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat dari variabel lainnya. Pada perihal ini yang menjadi variabel terikatnya mengenai Stabilitas Perdagangan Indonesia-New Zealand.
* **BAB IV** Bagian ini berisikan pembahasan,menguraikan serta menjawab Hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data.
* **BAB V** Bagian ini merupakan bagian terakhir dimana penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan atau hasil yang diperoleh.
1. Anak Agung Banyu Perwita & Yayan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Remaja Risdakarya, 2005), hlm. 136. [↑](#footnote-ref-1)
2. Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization and The Remaking of World Order* (London: Touchstone, 1998), hlm. 21. [↑](#footnote-ref-2)
3. Yulius P. Hermawan, *Tranformasi dalam Studi Hubungan Internasional* (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 33. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.,* hlm. 13. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nurraeni S., Deasy Silvya, Arfin Sudirman, *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 20. [↑](#footnote-ref-5)
6. Scott Burchill & Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional* (terjemahan: M. Sobirin) (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 47. [↑](#footnote-ref-6)
7. Yulius P. Hermawan, *Op.Cit.,* hlm. 6. [↑](#footnote-ref-7)
8. Lihat dalam Martin Griffiths, *Fifty Key Thinkers in International Relations* (London & New York: Routledge, 1999), hlm. 36-40. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lihat dalam Adji Samekto, *Kapitalisme Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 33-37. [↑](#footnote-ref-9)
10. Lihat dalam Hadi Soesastro, *Untuk Kelangsungan Hidup Bangsa* (Jakarta: CSIS, 1991), hlm. 86-88. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dalam artikel*“Global Economic Rebalancing This Century”,* Atlantic Sentinel*,* <http://atlanticsentinel.com/2011/05/global-economic-rebalancing-this-century/>. Di akses pada 13 Juni 2011. [↑](#footnote-ref-11)
12. Fareed Zakaria, *The Post American World* (New York: W. W. Norton & Company, 2008), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ekonomi Internasional diakses dari [http://garryaditya.blogspot.com/2015/ekonomi internasional.html](http://garryaditya.blogspot.com/2015/ekonomi%20internasional.html) pada 19 Okt. 15 08.30 WIB [↑](#footnote-ref-13)
14. Dr Narongchai Akrasanee, formly the Minister of Commerce and Senator of Thailand, was also the member of APEC Eminent Persons Group and APEC Business Advisory Council. [↑](#footnote-ref-14)
15. <http://ejournal.hi.fisip-unmul.org> diakses pada tgl 18 Oktober 2015, pkl 19.00 WIB [↑](#footnote-ref-15)
16. Veronika Saraswati,”ASEAN:*Bentuk Regionalisme atau Perpanjangan Empire?”(Jakarta:Global Juctice Update,2009)hlm.21* [↑](#footnote-ref-16)
17. <http://dfat.gov.au/trade/agreements/anzcerta/pages/australia-new-zealand-closer-economic-relations-trade-agreement.aspx> diakes pada tgl. 20 Oktober 2015, pkl. 19.00 WIB [↑](#footnote-ref-17)
18. Op,Cit [↑](#footnote-ref-18)
19. Op,Cit [↑](#footnote-ref-19)
20. Embassy of the Republic of indonesia,” *Indonesia-New Zealand-50 years diplomatic Relations”,* Wellington.2009 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid [↑](#footnote-ref-22)
23. J.C Johari **“**Hubungan Internasional merupakan sebuah study tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga study tentang pelaku-pelaku non negara(Non actors states) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas negara” diakses dari http:// [www.terpopuler.net/pengertian-defenisi-arti-hubungan-internasional-menurut](http://www.terpopuler.net/pengertian-defenisi-arti-hubungan-internasional-menurut) para ahli ; pada 20 Oktober 2015; pkl 20.00 Wib [↑](#footnote-ref-23)
24. Kj. Holsty,*Politik Internasional,* Remaja Rosda karya Bandung; 1988,hal 21-22. [↑](#footnote-ref-24)
25. Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi dan Administrasi Internasional*, (Jakarta: pustaka remaja, 1987) Hal 28. [↑](#footnote-ref-25)
26. Anak Agung Bayu Perwira, Op.Cit hal,48 [↑](#footnote-ref-26)
27. Norpirin,Ph.D, *Ekonomi Internasional(* Yogyakarta: Yogyakarta BPFE, 1997)hal 2. [↑](#footnote-ref-27)
28. R.E.A Manoer, dalam tujuan ekonomi internasional, diakses dari kumpulan-materi.blogspot.com/2015/10/tujuan –ekonomi-internasional.html pada 22 Okt. 15 [↑](#footnote-ref-28)
29. Robbock dalam Perdagangan Internasional, diakses dari: <http://www.gudangmateri.com/2015/10perdagangan-internasional.html>, pada 20 Oktober 2015 pkl. 20.00 Wib [↑](#footnote-ref-29)
30. Robert Gilpin, *US Power and The Multinational Corporation*. Dalam *Logika Hubungan*

*Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional, dan tatanan Dunia*, (Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama, 1993), hlm. 224 [↑](#footnote-ref-30)
31. Mohtar Mas’oed, *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2003), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-31)
32. Rudy, T. May, *Ekonomi Politik Internasional: Peran Domestik Hingga Ancaman Globalisasi*.

(Bandung: Nuansa, 2007), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-32)
33. Jagdish Bhagwati, “Regionalisme and Multilateralisme: an Overview”, Ross garanaut & Peter

Drysdale, *Asia Pasific Regionalisme: Reading in international economic Relations (*Canbera*:*the

Asutralia-Jepan Research Centre, 1994), hlm. 154. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ade Prianggani dan Oman Heryaman, *Kajian Strategis dalam dinamika hubungan luar negeri*

*Indonesia,* (Centre for Political and local Autonomy Studies, Bandung,2003). hal.164. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ernest Haas dikutip dalam Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan*

*Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 153. [↑](#footnote-ref-35)
36. S, Nuraeini, Deasy Silvya, Arfin Sudirman, *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 54. [↑](#footnote-ref-36)
37. <http://indaharitonang-fakultaspertanianunpad.blogspot.co.id/2013/06/integrasi-ekonomi.html>, diakses tgl, 26 Okt. 15, pkl, 20.00 WIB. [↑](#footnote-ref-37)
38. <http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-pasar-bebas-dan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tgl, 24 Oktober 2015, Pkl, 20.00 Wib. [↑](#footnote-ref-38)
39. Op,Cit. [↑](#footnote-ref-39)
40. <http://nasional.sindonews.com/read/937802/18/babak-baru-indonesia-selandia-baru-1418695695> diakses pada tgl, 17 Des. 15, pkl. 16.30 [↑](#footnote-ref-40)
41. Financeroll.co.id, diakses pada tgl, 18 Des 2015, pkl, 08.00

 [↑](#footnote-ref-41)